

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Akib, Muhammad. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- B. Kusumayudha, Sari. (2005). *Hiderologi Karst dan Geometri Fraktal di Daerah Gunungsewu*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- BPS Kabupaten Gunungkidul. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul 2018*. Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Fajar ND, Mukti., dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayati, Tri. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhjad, Muhammad Hadin. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Saleng, Abrar. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- _____(2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- _____(2010). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.

Supramono, Gatot. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____ (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Jurnal

- Amalia, Wisda, Adji Samekto, dan Eko Sabar Prihatin. (2016). Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah)., *Journal Law Reform. Vol. 12. No. 1.*
- Aziz, Mohammad. (2014). Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan Tambang di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Dinamika Rekayasa. Vol. 10 No. 1.*
- Dewi, Dahlia Kusuma. (2014). Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, dan Pendastran Tarigan. Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *USU Law Journal. Vol. II, No. 1.*
- Elvalina, Dedis. (2016). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *JOM Fakultas Hukum. Vol. II. No. 2.*
- Hambali. (2016). Implementasi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kecamatan Banawak Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis Vol. 4 No. 11.*
- Hidayat, Wahyu, Eman Rustiadi dan Hariadi Kartodiharjo. (2015). Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 26. No.2.*
- Muhdar, Muhammad, Mohammad Nasir, dan Rosdiana. (2015). Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara. *Hasanuddin Law Review. Vol. 1 No. 3.*
- Redi, Ahmad. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 5 No. 3.*
- Saija, Vica J.E. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Jurnal Sasi. Vol. 20. No. 1.*
- Sari, Ida Ayu Eling Purnama. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Lex Administratum. Vol. III. No. 4.*

Sompie, Evie. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. *Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23. No.9.*

Yakin, Sumadi Kamarol. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal. Vol. 2. Issues. 1.*

Website

Dyah Ayu Pitaloka. 2017. *Geliat Wisata Gunung Kidul Ancam Kelestarian Geopark Pegunungan Sewu.*
<https://www.rappler.com/indonesia/berita/180972-wisata-gunung-kidul-geopark-pegunungan-sewu>. diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 08:00 WIB.

GeologiNesia. 2016. *Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Batu Gamping (BatuKapur).* <https://www.geologinesia.com/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 pada pukul 07:20 WIB.

Gunungkidulpost. 2017. *Pemkab Tetapkan 9 Kawasan Tambang.*
<https://gunungkidulpost.com/pemkab-tetapkan-9-kawasan-tambang/>. diakses pada 29/01/2019 pukul 11:12 WIB.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. *Pengusaha Wajib Setor Jaminan.* <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8531/Pengusaha-Wajib-Setor-Jaminan>. diakses pada 29/01/2019 pukul 20:00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 2018. *Profil Daerah.*
<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/Profil-Kabupaten-Gunungkidul>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 20:26 WIB.